

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan dalam sebuah negara selalu berorientasi pada pembangunan sebuah negara. Hal ini termasuk sebuah upaya negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Beberapa negara memilih untuk menerapkan kebijakan yang moderat demi mencapai stabilitas negara melalui kerjasama. Tidak sedikit juga negara yang memilih untuk menerapkan kebijakan yang cenderung konservatif untuk menjaga stabilitas negaranya. Salah satu negara yang dikenal menerapkan kebijakan konservatif yakni Arab Saudi, resmi berdiri pada tanggal 23 September 1932. Arab Saudi juga merupakan negara yang memiliki pemahaman yang konservatif, baik dalam konteks agama maupun sosial, mereka sejatinya memiliki kesamaan budaya yang cukup kental yang berdasarkan oleh beraneka ragamnya suku-suku lokal yang terdapat di Arab Saudi.

Arab Saudi juga merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas Islam di dunia. Hal tersebut didukung dengan berlokasinya dua kota istimewa bagi masyarakat Islam sedunia, yaitu Kota Mekkah dan Kota Madinah. Hal ini menciptakan Arab Saudi menjadi negara yang sangat kompleks sehingga cukup sulit dalam mencari perbedaan antara syariat dengan tradisi lokal Arab.¹

¹ Abdulrahman E.A. Al Lily, *On Line and under Veil: Technology-Facilitated Communication and Saudi Female Experience within Academia*, *Technology in Society* 33, no. 1–2, (2011), diakses dari <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2011.03.005>. (14/05/2023,18:01 WIB)

Diskursus mengenai pembahasan sebuah negara di Semenanjung Arab sejatinya selalu menarik untuk dibahas. Selain dinamika tentang keagamaan, dan kondisi masyarakat yang konservatif, kawasan Timur Tengah memiliki posisi negara yang strategis dari sisi geopolitik yang sejak zaman kolonialisme selalu menjadi rebutan bangsa - bangsa Barat. Hal ini disebabkan oleh melimpahnya cadangan minyak yang dimiliki oleh negara pada kawasan tersebut. Oleh karena itu, Arab Saudi telah menjadi produsen minyak terbesar yang mendistribusikan minyak ke seluruh dunia.²

Pada tahun 2014, Arab Saudi mengalami ketimpangan di bidang ekonomi yang disebabkan oleh harga minyak dunia yang mengalami kemerosotan.³ Hal ini dilatarbelakangi karena melimpahnya pasokan minyak di pasar dunia.⁴ Di tahun yang sama Amerika Serikat sedang gencar-gencarnya melakukan revolusi energi dan disisi lain *Organization of Petroleum Exporting Countries* (selanjutnya disingkat OPEC) tidak dapat menyeimbangkan pasar, sehingga produksi minyak akhirnya dilakukan secara terus-menerus, Arab Saudi yang takut kehilangan pangsa pasar pada akhirnya terkalahkan dengan Amerika Serikat dan produsen minyak lainnya, hal inilah yang menyebabkan harga minyak turun drastis.⁵

² Wibowo Prihandono, *Fenomena Neorevivalisme Islam dalam Dunia Internasional*, Journal of Universitas Airlangga, Vol, 4, No, 2, (2010), diakses dari <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Fenomena%20Neorevivalisme%20Islam%20dalam%20Dunia%20Internasional.pdf> (12/08/2023,22:33 WIB)

³ Fajar Nugraha, *Visi 2030 dan Keterbukaan Arab Saudi*, Medcom.Id, (24 April 2018), diakses dari <https://www.medcom.id/internasional/opini/ybJ68v6b-visi-2030-dan-keterbukaan-arab-saudi.27> (05/04/2024,11:23 WIB)

⁴ VOA Indonesia, *Anjloknya Harga Minyak Dunia Tertajam Di 2014*, VOA Indonesia, (2015), diakses dari <https://www.voaindonesia.com/amp/anjloknya-harga-minyak-dunia-tertajam-di-2014/2582337.html> (08/03/2024,22:33 WIB)

⁵ Ellen May, *3 Alasan Harga Minyak Dunia Turun*, DetikFinance, (2017), diakses dari <https://finance.detik.com/market-research/d-3443300/3-alasan-harga-minyak-dunia-turun> (05/04/2024,11:29 WIB)

Harga minyak kemudian mengalami penyusutan (anjlok) lebih dari 50 persen. Pada awal tahun tersebut harga minyak cenderung stabil di angka \$110 perbarell, namun di bulan Juli harga minyak jatuh ke angka terendahnya yakni kurang dari \$50 perbarell.⁶ Inkonsistensi harga minyak tersebut mengakibatkan pendapatan negara Arab Saudi terus berkurang, menurut *International Monetary Fund* (selanjutnya disingkat IMF), Arab Saudi membutuhkan harga minyak \$105 perbarell agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disingkat APBN) mereka tetap sehat.⁷

Oleh karenanya, kerajaan Arab Saudi lantas mengembangkan strategi jitu untuk menghadapi situasi seperti ini. Melalui Putra Mahkota Muhammad bin Salman (selanjutnya disingkat MBS), kerajaan secara percaya diri dalam menetapkan target untuk mengurangi ketergantungan pada sektor minyak yang harganya tidak stabil sebagai sumber pendapatan utama negara pada tahun 2030, hal ini secara umum karena minyak bumi merupakan energi yang tidak dapat terbarukan, apabila minyak kemudian di eksploitasi secara terus-menerus maka sumber daya minyak akan mengalami penipisan dan akan habis sewaktu-waktu.⁸

Apabila dilihat dari sejarahnya, Arab Saudi sejatinya sudah dikenal oleh masyarakat internasional sebagai negara yang selalu mengandalkan hasil tambang

⁶ Misliharira Shaumi Putri, Reni Windiani, dan Satwika Paramasatya, *Liberalisasi Ekonomi Arab Saudi Dalam Saudi Vision 2030*, Journal of International Relations Diponegoro, Vol. 7, No. 3, (2021), <https://doi.org/10.14710/jirud.v7i3.31216>. diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/31216>. (06/04/2024,15:14 WIB)

⁷ BBC, *Harga Minyak Turun Tajam, Ekonomi Arab Saudi Terancam?*, BBC News Indonesia, (2016), diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/01/160129_majalah_saudi_minyak (05/04/2024,11:31 WIB)

⁸ Aannis Sania, 2022, *Analisis Kebijakan MBS dalam Upaya Modernisasi Arab Saudi Tahun 2017-2020*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia.

minyak sebagai penghasilan utama negara.⁹ Bahkan di tahun 2001-2013 Arab Saudi mendapatkan pendapatan sangat besar dari penjualan minyak bumi mereka hingga mencapai 70%.¹⁰ Di sisi lain, Arab Saudi sejatinya tidak memiliki alternatif sumber perekenomian yang signifikan selain dari penjualan hasil tambang minyak bumi, maka di tahun 2014 disaat harga minyak dunia mengalami penurunan (anjlok), hal tersebut menjadi teguran keras terhadap Arab Saudi yang terlalu ketergantungan terhadap hasil sumber daya alam minyak mereka. Di tahun berikutnya, Arab Saudi melaporkan defisit APBN pertama kali sepanjang sejarah sebesar \$100 miliar.¹¹ Hal tersebut kemudian mempengaruhi stabilitas dalam sektor politik, sosial, dan ekonomi di negaranya.¹²

Setelah belajar dari peristiwa tersebut, di tahun 2016 Kerajaan Arab Saudi kemudian mengubah sudut pandangnya terhadap bagaimana perspektif pembangunan sebuah negara. MBS sebagai perwakilan dari pihak kerajaan yang sekaligus sebagai Putra Mahkota Arab Saudi kemudian secara resmi dan terbuka memperkenalkan “*Saudi Vision 2030*” yang membawa Arab Saudi menjadi perhatian di dunia internasional. Implementasi visi ini diawasi oleh Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan (CEDA) dan melibatkan berbagai badan pemerintah

⁹ Eqqi Syahputra, *Kaya Dari Minyak, Kenapa Arab Saudi Masih Punya Utang Jumbo?*, CNBC Indonesia, (2022), diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221009142741-4-378288/kaya-dari-minyak-kenapa-arab-saudi-masih-punya-utang-jumbo> (05/04/2024,12:09 WIB)

¹⁰ Citra Nur Hikmah dan Abrar, *Saudi Vision: Reformasi Ekonomi Arab Saudi*, Sejarah dan Pendidikan Sejarah, Vol, 1, No, 1 (2019), hal. 27–39. Diakses dari <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/periode/article/view/10480> (12/07/2023,21:41 WIB)

¹¹ Yanurisa Ananta, *Saudi Berhenti Mencandu Minyak*, Media Indonesia, (2016), diakses dari <https://mediaindonesia.com/internasional/43508/saudi-berhenti-mencandu-minyak> (05/04/2024,13:13 WIB)

¹² Adi Warsito dan Serli Wulandari, *Konsep Pemerintahan Arab Saudi dan Kebijakan Visi 2030*, Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam, Vol, 2, No, 3, (2022), Diakses dari <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tanjak/article/view/14024/5077> (28/09/2024,23:41 WIB)

untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan. Di dalam *Saudi Vision 2030* tercantum 3 pilar utama yang menjadi fokus pelaksanaannya, yakni *A Vibrant Society*, *A Thriving Economy*, dan *An Ambitious Nation*, yang telah dijadikan sebagai strategi oleh Arab Saudi untuk menstabiliskan perekonomiannya dimasa mendatang.¹³

MBS berperan penting dalam merumuskan visi *Saudi Vision 2030*, sebuah proses yang tentunya membutuhkan waktu lama dan akan mengakibatkan perubahan dalam berbagai aspek, seperti sektor, budaya, ekonomi, sosial, dan politik.¹⁴ Bahkan hal tersebut terlihat sejak awal pengumuman kebijakan tersebut, yang mulai memicu reaksi pro dan kontra baik dalam ruang lingkup internal maupun eksternal kerajaan. MBS menyampaikan keinginannya untuk menjadikan Arab Saudi menjadi negara yang moderat dan terbuka untuk dunia.¹⁵

Menurut Esposito, disaat awal berdirinya negara Arab Saudi pihak kerajaan memang senang menetapkan dan selalu mengandalkan pencampuran antara konstitusi dan agama.¹⁶ Oleh karenanya, kerajaan menyadari bahwasannya hal tersebut harus diperbaharui dengan *Saudi Vision 2030* yang dianggap lebih terbuka dan moderat, dan tidak hanya menyangkut pada faktor ekonomi saja, namun dapat

¹³ Kingdom of Saudi Arabia, dan *Saudi Vision 2030, A Vibrant Society*, Government of Saudi Arabia, (2023), diakses dari <https://www.vision2030.gov.sa/en/vision-2030/overview/a-vibrant-society/>. (05/06/2024,16.00 WIB)

¹⁴ Anna Zakiah Derajat dan Toni Kurniawan, *Saudi Vision 2030 dan Kebijakan Reformasi Pada Kerajaan Arab Saudi*, Global and Policy Journal of International Relation, Vol, 9, No. 1, (Agustus 2021), Diakses dari <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jgp/article/view/2465> (04/08/2023,16:01 WIB)

¹⁵ Andi Adriansah, 2021, *Peran Politik Muhammad Bin Salman dalam Modernisasi Menuju Visi 2030 Arab Saudi*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

¹⁶ John L Esposito, 2002, *Unholy War: Terror in the Name of Islam*, New York: Oxford University Press.

berperan pada faktor-faktor seperti kondisi sosial budaya, keagamaan, dan politik yang diharapkan dapat memberikan citra Arab Saudi yang *acceptance* dan inklusif terhadap arus globalisasi modern seperti saat ini.

Suatu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat baik disadari atau tidak tapi lambat laun pasti terjadi. Hal ini dikarenakan oleh arus globalisasi yang selalu hadir dalam ruang lingkup dunia. Meskipun sifat dari perubahan sosial tersebut tidak selalu terlihat dan berpengaruh dalam kehidupan yang luas, hal ini sejatinya dikarenakan bahwa dampak perubahan sosial yang berjalan dengan lambat. Namun, perubahan tersebut dapat disaksikan pada suatu susunan kehidupan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.¹⁷

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan secara jelas terkait permasalahan yang muncul. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan diajukan oleh penulis tersebut ini adalah tentang:

1. ***“Bagaimana Pengaruh Penerapan “Saudi Vision 2030” Terhadap Perubahan Sosial Politik di Arab Saudi?”***

¹⁷ Ellya Rosana, *Modernisasi Dalam Perspektif Perubahan Nasional*, Al-Adyan, Vol, 10, No, 10, (Agustus 2015), Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/177402/modernisasi-dalam-perspektif-perubahan-sosial> (23/07/2023,19:27 WIB)

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang dilakukan mengenai **Pengaruh Penerapan “Saudi Vision 2030” Terhadap Perubahan Sosial Politik di Arab Saudi** adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui peran kerajaan dan pemerintah dalam penerapan kebijakan *Saudi Vision 2030* sebagai kepentingan nasional negara.
- b. Mengetahui pengaruh penerapan kebijakan *Saudi Vision 2030* yang berdampak pada perubahan sosial dan budaya dalam dinamika masyarakat di Arab Saudi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.1.1 Manfaat Akademis

Melalui hasil penelitian ini, Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan dan pengetahuan baru terhadap semua orang sehingga dapat menjadi inspirasi bagi penelitian yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Hubungan Internasional dalam memahami pengaruh penerapan ekonomi *Saudi Vision 2030* terhadap perubahan sosial budaya masyarakat di Arab Saudi. Penulis pun mengharapkan para pembaca dapat memahami peran Kerajaan dan Pemerintah Arab Saudi dalam mengimplementasikan penerapan kebijakan *Saudi Vision 2030* demi kepentingan nasional.

1.3.1.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan ilmu kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait pengaruh *Saudi Vision 2030* terhadap perubahan sosial budaya di Arab Saudi. Kemenlu dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merumuskan kebijakan luar negeri yang lebih efektif dan mendukung diplomasi dengan mempertimbangkan diversifikasi ekonomi dan perubahan sosial budaya yang terjadi Arab Saudi serta memperkaya literatur di bidang Hubungan Internasional.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama adalah artikel jurnal dari karya tulis **Fakih Fadilah Muttaqin** yang berjudul **“Perubahan Sosial Budaya Kerajaan Arab Saudi Sebagai Pengaruh Proxy War dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2018”**.¹⁸ Penelitian tersebut menemukan pergeseran sosial di Arab Saudi dipicu akibat keterlibatan negara dalam Proxy War terkait konflik Suriah. Arab Spring yang memicu revolusi di Timur Tengah, termasuk gerakan anti-pemerintah di Suriah tahun 2011, mendapat respons keras dari rezim Bashar al-Assad. Penindasan terhadap pengunjuk rasa di Suriah memicu kecaman internasional, termasuk dari Raja Abdullah dari Arab Saudi yang mendukung oposisi. Penulis menilai bahwa dinamika ini menginginkan tatanan baru yang mempengaruhi sosial budaya Arab Saudi. Arab Saudi, sebagai negara konservatif dengan tatanan sosial dan politik yang kuat, berupaya menjaga stabilitas dari ancaman eksternal.

¹⁸ Fakih Fadilah Muttaqin, *Perubahan Sosial Budaya Kerajaan Arab Saudi Sebagai Pengaruh Proxy War Dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2018*, Jurnal Kajian Islam Kontemporer 6, No. 1, (2022), Diakses dari <https://journal.unas.ac.id/himmah/article/view/1781> (30/06/2023, 19:51 WIB)

Penelitian ini relevan karena juga membahas perubahan sosial budaya di Arab Saudi, tetapi dengan fokus yang berbeda. Penelitian sebelumnya berfokus pada pengaruh kebijakan kerajaan dalam Proxy War, sementara tulisan lain fokus pada perubahan sosial budaya setelah kebijakan *Saudi Vision 2030* oleh MBS.

Penelitian kedua adalah karya tulis jurnal dari **Mas'odi** yang berjudul **“Wahhabisme vis-à-vis Reformasi Arab Saudi: MBS, Agensi, Moderasi, dan Diversifikasi Ekonomi”**.¹⁹ Penelitian ini mengeksplorasi kondisi sosial, ekonomi, dan religiopolitik di Arab Saudi setelah MBS meluncurkan *Saudi Vision 2030*. Hasil penelitian ini adalah MBS sebagai pemegang otoritas melihat adanya konstruksi sosial-keagamaan yang mempengaruhi eksistensi Wahhabisme di Arab Saudi. Sejak ratusan tahun, hubungan erat antara Kerajaan Arab Saudi dan Wahhabi mulai merenggang setelah MBS mereformasi kebijakan substansial, khususnya yang bercorak eksklusif sesuai pemahaman Wahhabi. Kebijakan MBS bertujuan mengalihkan basis ekonomi dari sektor minyak ke sektor lain seperti pariwisata dan infrastruktur, dikenal sebagai *Saudi Vision 2030*.

Relevansi penelitian ini dengan tulisan lain adalah bahwa keduanya membahas dampak *Saudi Vision 2030* yang diinisiasi oleh MBS. Perbedaan utamanya terletak pada fokus dan teori yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada peran MBS dalam kebijakan menuju moderasi dan dampaknya secara luas, menggunakan teori praksis sosial dan otoritas. Sedangkan tulisan lain berfokus pada elemen masyarakat yang terdampak oleh kebijakan MBS, menggunakan teori

¹⁹ Mas'odi, *Wahhabisme Vis-à-Vis Reformasi Arab Saudi: MBS, Agensi, Moderasi, dan Diversifikasi Ekonomi*, Al-Irfan, Vol. 3, No. 1, (2020), Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/318934/wahhabisme-vis-%C3%A0-vis-reformasi-arab-saudi-mbs-agensi-moderasi-dan-diversifikasi> (14/06/2023,22:31 WIB)

perubahan sosial dan konsep kepentingan nasional untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan kepentingan Arab Saudi dalam menerapkan *Saudi Vision 2030*.

Penelitian ketiga adalah “**Liberalisasi Ekonomi Arab Saudi dalam *Saudi Vision 2030***” yang merupakan karya tulis jurnal dari **Misliharira Shaumi Putri, Reni Windiani, dan Satwika Paramasatya.**²⁰ Penelitian ini menemukan bahwa Arab Saudi menggunakan liberalisasi ekonomi untuk mencapai tujuan *Saudi Vision 2030*. Dengan kekuatan internasional yang dimilikinya, Arab Saudi mengekspos dirinya secara global sekaligus melakukan kerjasama dan perjanjian ekonomi dengan negara lain untuk meningkatkan sektor ekonomi. Langkah ini tidak hanya meningkatkan citra internasional Arab Saudi tetapi juga mendukung rencana pembangunan infrastrukturnya. Kebijakan *Saudi Vision 2030* disambut dengan baik oleh masyarakat internasional, yang berdampak pada peningkatan signifikan kunjungan wisatawan dan ekspatriat ke Arab Saudi. Hal ini mencerminkan transformasi ekonomi dan sosial yang diupayakan oleh Saudi menuju masa depan yang lebih terbuka dan beragam.

Relevansi penelitian ini dengan tulisan lain adalah keduanya membahas kebijakan *Saudi Vision 2030* yang diinisiasi oleh MBS, tetapi dengan fokus yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada liberalisasi ekonomi sebagai syarat untuk mencapai tujuan *Saudi Vision 2030*, sementara tulisan ini berfokus pada dampak signifikan *Saudi Vision 2030* terhadap perubahan sosial dan budaya pada masyarakat serta diversifikasi beragam sektor ekonomi di Arab Saudi.

²⁰ Shaumi Putri, Windiani, dan Paramasatya, *Op. Cit.*, hal. 3

Penelitian Keempat adalah jurnal studi berbahasa Inggris yang merupakan karya tulis **Nadiya Azahra Hidayat, Yon Mahmudi, dan Siti Rohmah Soekarba** yang berjudul “**Vision 2030: Saudi Arabia’s Modernization**”.²¹ Penelitian ini mengkaji modernisasi yang dilakukan Arab Saudi sejak pencetusan *Saudi Vision 2030* oleh MBS, serta hubungan khusus dengan Wahhabi dalam mendukung proyek ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Saudi Vision 2030* bertujuan untuk memodernisasi Arab Saudi agar tetap relevan dan tidak tertinggal dalam arus globalisasi. Program ini mencakup reformasi ekonomi, sosial, dan budaya yang berfokus pada diversifikasi sumber pendapatan negara di luar sektor minyak. Dengan inisiatif ini, Arab Saudi berupaya memperkuat daya saingnya di kancah internasional, menciptakan lapangan kerja baru, dan memfasilitasi partisipasi yang lebih besar bagi perempuan dan kaum muda dalam pembangunan nasional. Meski konservatif, masyarakat Arab Saudi mulai melakukan reformasi ekonomi dan sosial menuju sistem lebih liberal untuk mewujudkan kesejahteraan negara.

Relevansi penelitian ini dengan tulisan lain adalah fokus pada kebijakan *Saudi Vision 2030*. Perbedaannya terletak pada sasaran dan tujuan penelitian. Penelitian ini membahas upaya Arab Saudi dalam memodernisasi negara dan strategi implementasi reformasi ekonomi dalam *Saudi Vision 2030*, sementara tulisan ini berfokus pada konstruksi sosial dan budaya yang terjadi setelah kebijakan ini diterapkan, cara mengeksplanasi juga menggunakan teori yang berbeda.

²¹ Nadiya Azahra Hidayat, Yon Machmudi, dan Siti Rohmah Soekarba, *Vision 2030: Saudi Arabia’s Modernization*, Center of Middle Eastern Studies (CMES), Vol, 15, No, 2 (Desember 2022), hal. 137–148. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/cmest/article/view/62857> (13/05/2023,18:01 WIB)

Penelitian Kelima adalah jurnal studi berbahasa Inggris yang merupakan karya penelitian dari **Leni Winarni** dan **Aberrant Pratama Yoga Nur Permana** yang berjudul “*Saudi Vision 2030 and the Challenge of Competitive Identity Transformation in Saudi Arabia*”.²² Penelitian ini menemukan bahwa Arab Saudi, di bawah kepemimpinan MBS, berupaya mengubah identitasnya dari negara konservatif menjadi lebih moderat. Tujuan utama transformasi ini adalah untuk meningkatkan daya saing Arab Saudi dalam ekonomi, politik, dan sosial di kancan global. Namun, upaya ini menghadapi hambatan signifikan dari pihak konservatif internal dan eksternal yang menolak perubahan tersebut. Hambatan dalam mewujudkan identitas baru Arab Saudi mencakup isu-isu seperti demokrasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Hal ini menghambat tujuan MBS untuk mengubah citra Arab Saudi menjadi lebih moderat dan liberal di mata dunia internasional.

Relevansi penelitian ini dengan tulisan lain adalah bahwa keduanya membahas transformasi di Arab Saudi, tetapi dengan fokus berbeda. Penelitian ini berfokus pada upaya MBS melawan hambatan dalam transformasi identitas Arab Saudi dan membangun reputasi baru secara global melalui *Saudi Vision 2030*, yang memiliki pro-kontra dalam kerajaan dan masyarakat. Sementara itu, tulisan ini lebih memfokuskan pada perubahan sosial dan budaya di masyarakat Arab Saudi setelah implementasi kebijakan tersebut.

²² Leni Winarni, dan Aberrant Pratama Yoga Nur Permana, *Saudi Vision 2030 and the Challenge of Competitive Identity Transformation in Saudi Arabia*, *Journal of Islamic World and Politics*, Vol, 6, No, 1 (Juni 2022), Diakses dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/jiwp/article/view/14579> (24/05/2024,16:45 WIB)

Penelitian Keenam adalah jurnal yang merupakan karya tulis **Femmyoroi Mutiara Ayu, Penny Kurnia Putri, dan Anak Agung Ayu Intan Parameswari** yang berjudul “**Analisis Idionsinkratik Putra Mahkota Muhammad bin Salman Atas Kebijakan Saudi Vision 2030**”.²³ Penulis menemukan bahwa latar belakang MBS sebagai putra sulung kerajaan memberi peluang besar untuk menjadi pemimpin masa depan. MBS dikategorikan sebagai pemimpin dengan gaya kepemimpinan *Goal Oriented* dan *Strategic Charismatic*, yang berani melawan batasan politik seperti opini publik dan media. Meskipun menghadapi protes keras dari masyarakat konservatif yang menilai kebijakan *Saudi Vision 2030* bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, pemerintah Arab Saudi tetap berkomitmen melanjutkan reformasi dengan berusaha menyeimbangkan antara modernisasi dan pelestarian nilai-nilai agama, dengan mengklaim bahwa reformasi ini diperlukan untuk masa depan yang lebih stabil, mandiri, dan berkelanjutan di era globalisasi.

Perbedaan antara Jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus, penelitian dalam jurnal tersebut mengeksplanasi dan menjabarkan kepribadian MBS dalam mencetuskan kebijakan *Saudi Vision 2030* melalui analisis idionsinkratik. Sedangkan dalam tulisan ini penulis menjabarkan peran politik MBS dan mengeksplanasi dampak perubahan sosial budaya yang terjadi pasca tercetusnya kebijakan *Saudi Vision 2030*.

²³ Femmyoroi Mutiara Ayu, Penny Kurnia Putri, dan Anak Agung Ayu Intan Parameswari, *Analisis Idiosinkratik Putra Mahkota Muhammad Bin Salman Atas Kebijakan Saudi Vision 2030*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol, 1, No, 2 (2022). Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/85255/43927> (24/09/2023,11:01 WIB)

Tabel 1. 1 Posisi Penelitian

No	Judul dan Nama Peneliti	Teori/Konsep dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<p>Fakih Fadilah Muttaqin (2022)</p> <p><i>Perubahan Sosial Budaya Kerajaan Arab Saudi Sebagai Pengaruh Proxy War dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2018</i></p>	<p>Teori: Perubahan Sosial</p> <p>Metode: Deskriptif</p>	<p>Fenomena Arab Spring yang terjadi di kawasan Timur Tengah telah menjadi sebuah inspirasi kepada masyarakat Suriah untuk melakukan demokratisasi. Gerakan masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai anti-pemerintah kemudian bermunculan di berbagai kota di Suriah dan melakukan unjuk rasa. Respon pemerintah terhadap unjuk rasa yang jauh dari prinsip HAM kemudian memantik kecaman seluruh dunia, salah satunya adalah kecaman dari Raja Abdullah yang mendukung massa anti-pemerintah untuk menggulingkan rezim Suriah.</p>
2.	<p>Mas'odi (2020)</p> <p><i>Wahhabisme vis-à-vis Reformasi Arab Saudi: MBS, Agensi, Moderasi, dan Diversifikasi Ekonomi</i></p>	<p>Teori: Otoritas dan Praksis Sosial</p> <p>Metode: Deskriptif</p>	<p>Kerajaan Arab Saudi dan Wahhabi telah memiliki romantisme dalam berbagi kekuasaan dalam segala ruang lingkup kenegaraan. Namun pasca teretusnya kebijakan <i>Saudi Vision 2030</i> kemudian meruntuhkan hubungan tersebut. Hubungan tersebut runtuh dikarenakan desakan perekomian negara yang sudah mengalami kemerosotan yang memaksa Kerajaan untuk mendiversifikasikan perekonomian negara.</p>
3.	<p>Misliharira Shaumi Putri, Reni Windiani, dan Satwika Paramasatya (2021)</p> <p><i>Liberalisasi Ekonomi Arab Saudi dalam Saudi Vision 2030</i></p>	<p>Konsep: Liberalisasi Ekonomi</p> <p>Metode: Kualitatif</p>	<p>Arab Saudi melakukan liberalisasi terhadap perekonomian negara untuk menghilangkan ketergantungan negara terhadap minyak. Dengan <i>Saudi Vision 2030</i>, negara menerapkan strategi jangka panjang untuk menstabiliskan perekonomian di masa depan.</p>

4.	<p>Nadiya Azahra Hidayat, Yon Mahmudi, dan Siti Rohmah Soekarba (2022)</p> <p><i>Vision 2030: Saudi Arabia's Modernization</i></p>	<p>Teori: Struktur Fungsionalism</p> <p>Konsep: <i>Decision Making</i> dan <i>Modernization</i></p> <p>Metode: Kualitatif-Deskriptif</p>	<p>Kerajaan Arab Saudi menerapkan <i>Saudi Vision 2030</i> bertujuan untuk memodernisasi negara Arab Saudi yang dirasa sedikit tertinggal dalam arus globalisasi dunia saat ini. Masyarakat Arab Saudi yang dikenal konservatif dapat dengan cepat menerapkan reformasi ekonomi dan sosial yang mengarah ke sistem liberal.</p>
5.	<p>Leni Winarni dan Aberrant Pratama Yoga Nur Permana (2022)</p> <p><i>Saudi Vision 2030 and the Challenge of Competitive Identity Transformation in Saudi Arabia</i></p>	<p>Teori: Konstruktivisme</p> <p>Konsep: Identitas Kompetitif dan <i>Nation Branding</i></p> <p>Metode: Kualitatif-Analisis Tematik</p>	<p>Melalui <i>Saudi Vision 2030</i>, Arab Saudi menginginkan untuk mengubah identitas negara yang dikenal konservatif menjadi negara moderat yang bertujuan untuk menjadi negara yang memiliki daya saing dengan negara lain secara global dalam mengembangkan beragam sektor seperti, ekonomi, politik dan sosial.</p>
6.	<p>Femmyoroi Mutiara Ayu, Penny Kurnia Putri, dan Anak Agung Ayu Intan Parameswari (2020)</p> <p><i>Analisis Idionsinkratik Putra Mahkota Muhammad bin Salman atas Kebijakan Saudi Vision 2030</i></p>	<p>Teori: Kebijakan Luar Negeri Idiosinkratik</p> <p>Metode: Kualitatif-Eksplanatif</p>	<p>MBS adalah seorang pemimpin yang memiliki kepribadian berbeda dengan pemimpin yang sudah ada sebelumnya. Dengan kepribadian pemimpin yang baru, masyarakat Arab Saudi tentunya terkejut dengan hal-hal yang dilakukan oleh sang putra mahkota, khususnya dalam mengubah struktur perekonomian negara kearah liberal yang sejatinya hal ini melatarbelakangi perubahan signifikan terhadap segi ekonomi dan <i>socio-culture</i> di Arab Saudi walaupun dengan banyak sikap kontra yang hadir dalam masyarakat karena kebijakan yang dicetuskan dianggap menyimpang dan jauh dari norma Islam.</p>
7.	<p>Mochammad Bambang Sadewa</p>	<p>Teori: Perubahan Sosial dan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MBS meluncurkan kebijakan <i>Saudi Vision 2030</i> dengan alasan</p>

	(2024) <i>Pengaruh Penerapan "Saudi Vision 2030" Terhadap Perubahan Sosial Budaya Arab Saudi</i>	Konsep Kepentingan Nasional Metode: Eksplanatif Kualitatif	kepentingan nasional untuk mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh sektor. Selain itu, berdasarkan Teori Perubahan Sosial, kebijakan ini telah berpengaruh signifikan pada perubahan struktur sosial dan budaya masyarakat lokal, mengubah pandangan konservatif menjadi lebih moderat dan bertoleransi terhadap perbedaan agama.
--	---	---	--

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan hal mendasar dalam menjelaskan perilaku suatu negara dalam dunia internasional. Di sisi lain, kepentingan nasional secara spesifik dapat menjelaskan kebutuhan penting yang dibutuhkan suatu negara, seperti keamanan, pertahanan, militer, dan pembangunan ekonomi.²⁴ Dalam kepentingan nasional, ada dua kategori utama yakni kepentingan vital, dan kepentingan non-vital. Kepentingan vital menggambarkan seberapa penting dan mendesaknya suatu kepentingan, yang harus segera diambil keputusan saat negara menghadapi situasi darurat. Sebaliknya, kepentingan non-vital lebih berkaitan dengan proses jangka panjang yang meskipun memakan waktu lebih lama, hasil dan manfaatnya akan lebih terasa di masa depan.²⁵

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional adalah kepentingan yang berkaitan dengan eksistensi, kekuasaan, dan kemakmuran suatu negara. Ia berpendapat bahwa kepentingan nasional merupakan hal yang fundamental bagi

²⁴ Jack C. Plano dan Roy Olton, 1999, *Kamus Hubungan Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, Jakarta: Putra Abardin.

²⁵ Aleksius Jemadu, 2008, *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, Ed.1, Yogyakarta: Graha Ilmu.

suatu negara, dan seluruh kebijakan luar negeri harus didasarkan pada kepentingan nasional. Morgenthau juga berpendapat bahwasannya kepentingan nasional suatu negara terdiri dari kebutuhan dasar yang vital seperti keamanan, integritas wilayah, dan kesejahteraan ekonomi.²⁶ Tujuan dari kebijakan luar negeri suatu negara haruslah mempertahankan dan menggunakan kekuatannya untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Kepentingan nasional menggambarkan tujuan-tujuan yang ingin diraih oleh suatu negara yang sehubungan dengan apa yang telah dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif senantiasa selaras diantara semua negara ataupun bangsa adalah keamanan yang meliputi kesinambungan hidup masyarakat serta kebutuhan wilayahnya dan kesejahteraan (*prosperity*), dan merupakan sebuah dasar dalam merumuskan dan menentukan kepentingan nasional bagi setiap negara.²⁷ Menurut Hans J. Morgenthau, konsep kepentingan nasional mencakup tiga aspek utama:

- 1. Perlindungan Identitas Fisik:** Aspek ini memiliki pengertian bahwa negara harus mampu mempertahankan integritas teritorialnya. Melindungi batas-batas wilayah dari ancaman eksternal adalah prioritas utama untuk memastikan keberlangsungan negara.
- 2. Perlindungan Identitas Politik:** Aspek ini memiliki pengertian bahwa negara harus mampu mempertahankan rezim politik dan ekonominya.

²⁶ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. 2006, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

²⁷ Teuku May Rudy, 2002, *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Bandung: Refika Aditama.

Stabilitas dan kelangsungan sistem politik serta ekonomi yang ada sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan fungsi negara.

- 3. Perlindungan Identitas Kultur:** Aspek ini memiliki pengertian bahwa negara melibatkan upaya dalam menjaga bahasa dan sejarah bangsa. Mempertahankan warisan budaya dan identitas historis penting untuk membangun rasa kebersamaan dan kebanggaan nasional.²⁸

Dengan memahami tiga aspek ini, kepentingan nasional berperan sebagai panduan utama dalam menentukan arah setiap tindakan diplomatik dan kebijakan negara. Dengan menjadikan kepentingan ini sebagai fokus utama, negara dapat memastikan bahwa semua langkah yang diambil berkontribusi terhadap keberlanjutan jangka panjang, menjaga keamanan nasional, dan melindungi serta memperkuat identitas bangsa. Setiap keputusan dan strategi dirancang dengan cermat agar selaras dengan tujuan ini, memastikan bahwa negara tetap stabil, aman, dan memiliki karakter yang jelas di tengah dinamika global. Dalam konteks *Saudi Vision 2030*, kebijakan ini memperkuat kepentingan nasional Arab Saudi melalui diversifikasi ekonomi, perlindungan integritas teritorial, reformasi ekonomi inklusif, dan pelestarian warisan budaya. Dengan adanya *Saudi Vision 2030*, diharapkan tercipta masa depan yang berkelanjutan bagi Arab Saudi. Melalui peningkatan hubungan diplomatik dan kerjasama global, negara ini berharap dapat mengambil peran yang lebih signifikan dalam urusan regional dan internasional di masa yang akan datang.

²⁸ Hans Morgenthau, *Hannah Arendt on Totalitarianism and Democracy, Social Research*, Vol, 44, no. 1, (1977), pp. 127–31, JSTOR, diakses dari <https://www.jstor.org/stable/40970275>. (08/06/2024, 05:47 WIB)

1.5.2 Teori Perubahan Sosial

Manusia menggambarkan insan yang aktif, artinya manusia hendak senantiasa mengaplikasikan perubahan sosial dalam menjalankan aktivitas kehidupannya dalam sehari-hari. Tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan, meski dalam tingkatan yang sangat kecil sekalipun, masyarakat akan senantiasa berubah. Perubahan tersebut bisa berbentuk transformasi yang amat mempengaruhi bagi aktivitas ataupun perilaku manusia.²⁹ Potret perubahan sosial mengacu pada transformasi dalam struktur sosial suatu kelompok atau masyarakat dari waktu ke waktu yang melibatkan perubahan dalam perilaku sosial, hubungan antar sosial, dan institusi sosial. Perubahan ini bisa berlangsung secara bertahap atau secara revolusioner, dan dapat dipengaruhi oleh beragam faktor seperti, ekonomi, politik, budaya, agama, lingkungan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.³⁰

Menurut John L. Gillin, perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima, dikarenakan oleh adanya transformasi kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi dan penemuan baru dalam masyarakat.³¹ Fenomena tersebut pada akhirnya menghasilkan masyarakat yang segera menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul seiring dengan pertumbuhan masyarakat.³²

²⁹ Nanang Martono, 2011, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*, 1st ed, Yogyakarta: Graha Ilmu.

³⁰ Emily Hannigan-Page, *Social Change and Why It Matters*, Western Governors University, (2023), diakses dari <https://www.wgu.edu/blog/social-change-why-it-matters2305.html>. (26/05/2024, 23:15 WIB)

³¹ John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, 1950, *Cultural Sociology*, United Kingdom: Macmillan Education UK.

³² Soekanto Soerjono, 2020, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.

Menurut Gillin, perubahan sosial terjadi melalui segilir-rangkaian tahap yang disebut "siklus kehidupan sosial". Dia mengidentifikasi empat tahap dalam siklus ini:

- 1. Tahap Penemuan (*discovery*):** Tahap ini melibatkan penemuan atau inovasi baru yang memicu perubahan sosial. Penemuan ini bisa berupa teknologi baru, gagasan, atau perubahan dalam struktur sosial.
- 2. Tahap Penyebaran (*diffusion*):** Setelah penemuan atau inovasi muncul, mereka mulai menyebar melalui masyarakat. Proses penyebaran dapat melibatkan komunikasi, interaksi sosial, dan pengaruh antarindividu atau kelompok.
- 3. Tahap Penyesuaian (*adjustment*):** Tahap ini melibatkan penyesuaian masyarakat terhadap perubahan yang terjadi. Individu dan kelompok harus mengubah perilaku, nilai-nilai, dan struktur sosial mereka sesuai dengan perubahan yang terjadi.
- 4. Tahap Stabilisasi (*stabilization*):** Tahap terakhir dalam siklus kehidupan sosial menurut Gillin adalah tahap stabilisasi. Pada tahap ini, perubahan sosial baru telah diterima dan diadopsi secara luas oleh masyarakat. Masyarakat telah menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dan mencapai tingkat keseimbangan baru.³³

Saudi Vision 2030 adalah contoh konkret dari yang dapat menjelaskan perubahan sosial yang terjadi di Arab Saudi. Tahap penemuan (*discovery*) terjadi ketika diluncurkannya inovasi baru yakni *Saudi Vision 2030* dan kebijakan-

³³ Gillin dan Gillin, *Op. Cit.*, hal. 19

kebijakan yang mendukung. *Saudi Vision 2030* merupakan upaya ambisius Arab Saudi untuk mendiversifikasi ekonomi negara yang selama ini bergantung pada minyak. Tahap penyebaran (*diffusion*) yakni masa diperkenalkannya inovasi ini ke berbagai sektor seperti ekonomi, politik, dan sosial yang melibatkan sosialisasi dan promosi. Tahap penyesuaian (*adjustment*) merupakan peluncuran kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan tujuan *Saudi Vision 2030* dan dilakukan secara bertahap untuk memastikan transisi yang mulus dan minim gangguan. Tahap terakhir adalah stabilisasi (*stabilization*) dimana perubahan yang dihasilkan dari implementasi kebijakan baru mulai terlihat dan diterima oleh masyarakat luas. Stabilitas tercapai ketika masyarakat dan ekonomi telah sepenuhnya beradaptasi dengan perubahan tersebut, menjadikan inovasi dan kebijakan baru sebagai norma.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Analisis data dilakukan untuk menggambarkan kondisi dan menjawab masalah secara objektif. Penelitian eksplanatif berfokus pada penguraian dan pengujian hipotesis yang berkaitan dengan judul penelitian.³⁴ Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi problematika terkait isu-isu sosial dan kemanusiaan. Dengan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika ini, penelitian ini

³⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, 1989, Jakarta: LP3ES, Rev.ed.

bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan dan implikasi dari tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini.³⁵

1.6.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang bertujuan untuk mengeksplanasi dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Teknik analisis dilakukan melalui observasi data yang bertujuan untuk menganalisis berbagai gejala maupun fenomena. Analisis ini memanfaatkan data dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang terwujud dalam teks, bukan dalam bentuk angka atau data statistik.³⁶ Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan wawasan yang lebih holistik mengenai subjek yang dianalisis, sehingga memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendetail tentang fenomena yang sedang dipelajari.

1.6.3 Variabel Penelitian

Dalam penelitian eksplanatif, terdapat dua jenis variabel yang saling berhubungan yakni, variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah kebijakan *Saudi Vision 2030*, yang berfungsi sebagai pengaruh utama dan menjelaskan dampaknya terhadap variabel lain. Kebijakan ini mencakup berbagai program untuk memodernisasi dan mendiversifikasi ekonomi serta membawa perubahan sosial dan budaya di Arab Saudi. Variabel dependen adalah

³⁵ John W Creswell dan Creswell J David, 2023, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, ed. Leah Fargotstein, Thousand Oaks, California, United States: Sage Publications, Inc.

³⁶ Safrilsyah Syarif dan Firdaus M. Yunus, 2013, *Metode Penelitian Sosial*, Banda Aceh: Ushuluddin Publishing.

aspek sosial dan budaya masyarakat Arab Saudi yang dipengaruhi oleh kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perubahan yang dihasilkan oleh *Saudi Vision 2030* mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya, serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini mencapai tujuannya dalam mengubah masyarakat.

1.6.4 Tingkat Analisis

Penelitian ini menggunakan peringkat analisa dari level individu dan kelompok yang direpresentasikan sebagai masyarakat Arab Saudi atas adanya perubahan dalam ruang lingkup sosial dan budaya yang diakibatkan oleh faktor kebijakan atau program yang telah diinisiasikan oleh kerajaan Arab Saudi yakni *Saudi Vision 2030*. Kemudian dapat disimpulkan bahwa Unit Eksplanasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Arab Saudi dan Negara Arab Saudi adalah Unit Analisa. Sehingga hubungan antara unit eksplanasi dan unit analisisnya adalah **Reduksionis**.

Tabel 1. 2 Tingkat Analisis

Unit Analisa Unit Eksplanasi	Individu dan Kelompok	Negara-Bangsa	Sistem Regional dan Global
Individu dan Kelompok	Korelasionis	Reduksionis	Reduksionis
Negara-Bangsa	Induksionis	Korelasionis	Reduksionis
Sistem Regional dan Global	Induksionis	Induksionis	Korelasionis

Sumber: Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi.³⁷

³⁷ Mohtar Mas'ood, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES.

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian

Batasan waktu untuk penelitian ini adalah tahun 2016-2023 karena *Saudi Vision 2030* ini baru diresmikan di tahun 2016 dan tahun 2023 adalah waktu penelitian ini dibuat. Sementara itu, ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi pada dampak penerapan kepentingan nasional *Saudi Vision 2030* terhadap berbagai variabel perubahan sosial dan budaya di masyarakat.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengkaji penelitian ini dengan menggunakan teknik pencarian pengumpulan data menggunakan *library research* dan *internet based research* dengan mencari referensi yang memiliki unsur keterkaitan terhadap pembahasan mengenai **Pengaruh Penerapan *Saudi Vision 2030* Terhadap Perubahan Sosial Politik Masyarakat Arab Saudi**. Data tersebut bersumber dari buku, artikel jurnal, dan skripsi yang didapat melalui Google Scholar, Aplikasi Pencarian Data *Harzing: Publish or Perish 8*, dan lainnya.

1.7 Hipotesa

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan untuk menjelaskan pengaruh penerapan dalam kebijakan *Saudi Vision 2030* terhadap perubahan sosial politik di Arab Saudi, penulis menggunakan dua pendekatan yakni Konsep Kepentingan Nasional dan Teori Perubahan Sosial. Kebijakan *Saudi Vision 2030* yang dicetuskan oleh MBS ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi Arab Saudi berdasarkan konsep Kepentingan Nasional, hal ini dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan dan melindungi identitas fisik, politik dan ekonomi serta budaya. Sementara itu, berdasarkan Teori Perubahan Sosial, kebijakan *Saudi Vision 2030*

mempengaruhi kondisi sosial dan budaya di masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan sosial yang dibawa oleh *Saudi Vision 2030* kemudian dijelaskan dalam 4 tahap menurut Gillin dan Gillin. Pertama, *discovery* (penemuan) yakni munculnya inovasi baru sebagai strategi ekonomi Arab Saudi yakni *Saudi Vision 2030*. Kedua, *diffusion* (penyebaran) yakni proses penyebaran inovasi tersebut ke berbagai sektor, seperti ekonomi, politik, dan sosial yang kemudian dipertimbangkan implementasinya. Ketiga, *adjustment* (penyesuaian) yakni proses penerapan kebijakan-kebijakan baru sesuai dengan *Saudi Vision 2030* secara bertahap. Keempat, *stabilization* (stabilisasi) yakni hasil dari implementasi dan perubahannya telah diterima oleh masyarakat luas walaupun masih ada sedikit tantangan dari kaum konservatif.

1.8 Sistematika Penulisan

Tabel 1. 3 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN	<ul style="list-style-type: none"> 1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian <ul style="list-style-type: none"> 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian <ul style="list-style-type: none"> a. Manfaat Akademis b. Manfaat Praktis 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Teori <ul style="list-style-type: none"> 1.5.1 Konsep Kepentingan Nasional 1.5.2 Teori Perubahan Sosial 1.6 Metode Penelitian <ul style="list-style-type: none"> 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Teknik Analisis Data 1.6.3 Variabel Penelitian 1.6.4 Tingkat Analisis 1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.6 Teknik Pengumpulan Data 1.7 Hipotesa 1.8 Sistematika Penulisan
------------------------------	---

<p>BAB II SAUDI VISION 2030 SEBAGAI VISI POLITIK ARAB SAUDI</p>	<p>2.1 Gambaran Umum Arab Saudi 2.1.1 Sejarah Arab Saudi: Dari Dinasti Saud hingga Modernisasi 2.1.2 Potret Sosial Budaya di Arab Saudi 2.1.3 Potret Ekonomi di Arab Saudi 2.2 Proyeksi Politik Arab Saudi dalam <i>Saudi Vision 2030</i> 2.2.1 Kepentingan Nasional a. <i>An Ambitious Nation</i> dalam Kepentingan Identitas Fisik b. <i>A Thriving Economy</i> dalam Kepentingan Identitas Ekonomi dan Politik c. <i>A Vibrant Economy</i> dalam Kepentingan Identitas Kultur 2.2.2 Transformasi Ekonomi Pasca <i>Saudi Vision 2030</i></p>
<p>BAB III POTRET PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA PASCA SAUDI VISION 2030</p>	<p>3.1 Tahap Penemuan (<i>Discovery</i>) 3.1.1 <i>Five-Year Development Plans</i> 3.1.2 <i>Saudi Vision 2030</i> 3.2 Tahap Penyebaran (<i>Diffusion</i>) 3.2.1 Sektor Pemerintahan dan Ekonomi 3.2.2 Sektor Sosial dan Budaya 3.3 Tahap Penyesuaian (<i>Adjustment</i>) 3.3.1 Kebijakan Pengurangan Peran Polisi Agama 3.3.2 Kebijakan Perubahan Hukum Ketenagakerjaan 3.3.3 Kebijakan Peningkatan Fasilitas Kesehatan 3.3.4 Kebijakan Liberalitas Sektor Hiburan 3.3.5 Kebijakan Izin Mengemudi bagi Perempuan 3.3.6 Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Ketenagakerjaan 3.3.7 Kebijakan Pemberian Visa Izin Wisata 3.3.8 Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan 3.4 Tahap Stabilisasi (<i>Stabilization</i>) 3.4.1 Stabilisasi di Masyarakat 3.4.2 Stabilisasi di Ekonomi 3.4.3 Stabilisasi di Politik</p>
<p>BAB IV PENUTUP</p>	<p>4.1 Kesimpulan 4.2 Saran</p>